

DAFTAR BACAAN

Buku-Buku

- Arba, *Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Bakri, Muhammad, *Hak Menguasai Tanah Oleh Negara*, Citra Media, Yogyakarta, 2007.
- Harsono, Budi, *Hukum Agraria Indonesia Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi Dan Pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Herawan Sauni, *Politik Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press Kampus USU, Sumatera Utara, 2006.
- Najih, Mokhammad, dan Soimin, *Pengantar Hukum Indonesia*, Setara Press, Malang, 2012.
- Poesponoto, Soebakti, *Asas dan Susunan Hukum Adat Terjamahan*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2021.
- Rahardjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012.
- Santoso, Urip, *Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah*, Kencana Prenamedia Group, Jakarta, 2012.
- Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif Empiris dan Gabungan*, Cetakan Pertama, Unigres Press, Gresik, 2022.
- , *Pengantar Hukum Agraria*, Cetakan Pertama, Deepublish, Yogyakarta, 2023.
- Soekanto, Soerjono, *Hukum Adat Indonesia*, Cet ke-5, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Salle, Aminuddin, *Bahan Ajaran Hukum Agraria*, AS Publishing, Makassar, 2010.
- Sumardjono, Maria S.W, *Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta Bangunan*, Kompas, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta, 2007.
- Yosua, Suhanan, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Restu Agung, Jakarta, 2010.

Yamin, Muhammad dan Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2004.

Yoshua, Suhanan, *Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dalam Sistem Hukum Pertanahan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.

Zaman, Nurus, *Hukum Politik Pengadaan Tanah*, Refika Aditama, Bandung, 2016.

Skripsi-Skripsi

Indria, Riza, *Upaya Penyelesaian Sengketa Tanah Antara Desa Mojo dan Desa Pesantren*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 2003.

Kurniasih, Eti, *Pemberian Hak Milik Atas Tanah Dari Tanah Negara Terhadap Pegawai Negeri Sipil*, Tesis, Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro, Semarang, 2010.

Natsir, Masyithah Utrujah Dwi, *Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Oleh Masyarakat Dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Makassar, 2016.

Stiyobudi, Muhammad Agung, *Status Kepemilikan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Dan Perlindungan Hukum Di Bantaran Sungai Layang Desa Kesesi Kabupaten Pekalongan*, Skripsi, Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2020.

Jurnal Hukum

Dewi, Iga Gangga Santi, *Konflik Status Hukum Tanah Timbul di Wilayah Pesisir Provinsi Bali*, Jurnal MMH, Vol.41, No.4, Oktober 2012.

Suyanto, *Hak Tanah Oloran (Aanslibbing) di Kecamatan Ujung Pangkah Kabupaten Gresik Prespektif Hukum Tanah Adat Dalam Sistem Hukum Pertanahan Nasional*, Jurnal Pena Justisia, Vol.22, No.2, Juni 2023.

Sari, Dewi Arnita, *Sengketa Pendaftaran Hak Milik Atas Tanah*, Jurnal Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam, Vol.5, No.2, Juli 2020.

Yoppie Christian, et.al., *Iregularitas Agraria "Tanah Timbul" (Aanslibbing) Dan Perubahan Lanskap Di Wilayah Pesisir Ujung Pangkah, Gresik Jawa Timur*, Jurnal Agraria dan Pertanahan, Vol.5, No.2, November 2019.

Media Daring

Mampu.Or.Id, *Memahami Tahapan Dan Penerapan Peraturan Daerah Sesuai Kaidah*, diakses melalui: <https://www.mampu.or.id/kegiatan/pentingnya-pembuatan-dan-implementasi-perda-sesuai-kaidah-dan-kebutuhan>, diakses pada tanggal 23 Maret 2025.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, Daerah Penguasaan Sungai, dan Bekas Sungai.

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Pertanahan Di Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pelimpahan Kewenangan Penetapan Hak Atas Tanah dan Kegiatan Pendaftaran Tanah